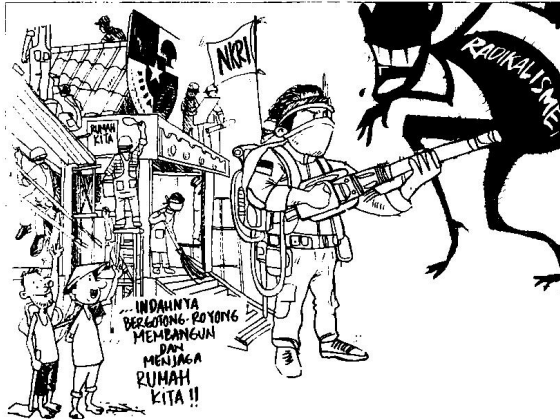


Judul : Puan Maharani mencetak sejarah
Tanggal : Selasa, 15 Oktober 2019
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 16-17

Suara Pembaruan | Selasa, 15 Oktober 2019



Suara Pembaruan | Selasa, 15 Oktober 2019

Puan... sambungan dari hal 16

Puan Maharani Mencetak Sejarah

Selasa, awal bulan ini, 1 Oktober 2019, dalam Rapat Paripurna DPR ke-2, lahir sejarah baru dalam dunia politik Indonesia. Puan Maharani (46), menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua setelah 74 tahun keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).

Penulis beruntung menyaksikan secara langsung momentum bersejarah itu. Tepat pukul 20.01 WIB, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali memandu pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPR periode 2019-2024 tersebut.

Puan, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Tengah V, dilantik bersama empat wakil ketua DPR lainnya. Mereka adalah Azis Syamsuddin (Fraksi Partai Golkar Dapil Lampung II), Sutmi Dasco Ahmad (Fraksi Partai Gerindra Dapil Banten III), Rachmad Gobel (Fraksi Nasdem Dapil Gorontalo), dan Muhaemin Iskandar (Fraksi PKB Dapil Jawa Timur VIII).

Trah Soekarno

Puan Maharani seolah melanjutkan tradisi serba pertama dalam trah politik Soekarno. Proklamator kemerdekaan Indonesia tersebut menjadi presiden pertama RI. Putrinya, Megawati Soekarnoputri, menjadi presiden perempuan pertama RI. Dan kini cucu Soekarno menjadi ketua DPR perempuan pertama di negeri ini.

Puan merupakan putri dari Megawati Soekarnoputri dan Taufiq Kiemas. Secara genetis, dalam tubuhnya mengalir darah Soekarno. Puan adalah cucu biologis dan ideologis dari Soekarno. Dalam banyak kesempatan, Puan kerap menyampaikan pemikiran dan ide-ide Soekarno, kakeknya itu.



TRIMEDIYA PANJAITAN

Persinggungannya dengan dunia politik dimulai sejak SMP, ketika ibunya mulai aktif kembali di dunia politik. Puan menyaksikan langsung ketika Megawati dicegah rezim Orde Baru untuk masuk dalam struktur Partai Demokrasi Indonesia (PDI), hingga kemudian membentuk PDI Perjuangan dan menjadi ketua umum hingga sekarang.

Kehidupan yang dekat dengan politik itu menjadi berkah bagi Puan. Ia kaya dengan pengalaman empiris di dunia politik. Ia terlibat secara langsung dalam pembelajaran berpolitik secara genetis dari ibunya. Ia memiliki mentor politik yaitu kedua orang tuanya, Megawati dan mendiang Taufiq Kiemas.

Puan terjun ke politik pada Pemilu 2009 sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan dari Dapil Jawa Tengah V, dan berhasil meraih suara terbanyak kedua di tingkat nasional dengan 242.504 suara. Pada Pemilu 2014, ia kembali juara kedua tingkat nasional dengan perolehan 369.927 suara. Namun, ia tidak lama di parlemen karena diangkat Presiden Joko Widodo

sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pada Pemilu Legislatif 2019 yang digelar serentak dengan pemilu presiden, Puan meraih suara terbanyak pertama secara nasional dengan perolehan 404.034 suara. Dengan demikian, secara mara-politik dan hukum, ia memang layak terpilih menjadi ketua DPR RI. Ia anggota DPR RI dengan perolehan suara terbanyak nasional dan partainya, PDI Perjuangan adalah pemenang pemilu.

Penilaian pimpinan DPR R periode sekarang berbeda dibandungkan periode sebelumnya. Btl sebelumnya pimpinan DPR dipilih dengan sistem paket dari fraksi raksi, kemudian dilakukan voting sekarang ditentukan oleh hasil pemilu. Menurut Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang sudah direvisi, pimpinan DPR berjumlah lima orang berasal dari partai politik peringkat lima besar dalam Pemilu 2019. Karena itu, ketua dan wakil ketua DPR ditentukan secara internal oleh lima fraksi yang memiliki kursi terbanyak, yaitu PDI Perjuangan Partai Golkar, Partai Gerindra Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasdem.

Harapan dan Tantangan

Selama ini DPR menjadi lembaga negara yang kerap disorot kinerjanya oleh semua elemen masyarakat. Ini wajar karena kam diangkat untuk mewakili kepentingan rakyat. Bukan hanya komentar dan kritik, tapi gelombang unjuk rasa datang berubi-ubi datang ke Kompleks Parlemen. Semanyan selama dua pekan terakhir, men jelang berakhirnya Periode DPF 2014-2019.

Bersambung ke halaman 17

Para pengunjuk rasa yang terdiri mahasiswa, pelajar, dan masyarakat itu menolak sejumlah produk legislatif dan hasil kerja DPR. Sejumlah penolakan disuarakan, mulai Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan empat RUU lainnya, UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), hingga pemilihan pimpinan KPK yang baru.

Para wakil rakyatnya di parlemen agar bisa menjadi saluran aspirasi mereka. Kinerja parlemen periode lalu harus menjadi bahan evaluasi bagi kami bekerja lebih giat. Tantangan meningkatkan kinerja parlemen itu berada di pundak Ketua DPR Puan Maharani dan empat wakil ketua lainnya, serta 570 anggota DPR lainnya yang baru dilantik.

“
Kehidupan yang dekat dengan politik itu menjadi berkah bagi Puan. Ia kaya dengan pengalaman empiris di dunia politik. Ia terlibat secara langsung dalam pembelajaran berpolitik secara genetis dari ibunya. Ia memiliki mentor politik yaitu kedua orang tuanya, Megawati dan mendiang Taufiq Kiemas.

RUU-RUU tersebut akhirnya ditunda pengesahannya.

Penilaian dari masyarakat banyak yang bernada miring kepada parlemen. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), misalnya, menilai kinerja DPR di bidang legislasi buruk dari segi kuantitas maupun kualitas. Formappi juga menilai politik legislasi DPR membela elit, fungsi anggaran tidak prorakyat, pengawasan tak bertaring, dan performa lembaga merana.

Penulis sendiri mengakui produktivitas DPR di bidang legislasi kurang *maximal*. Total RUU yang disahkan DPR periode 2014-2019 hanya 84 buah, kalah dari DPR periode 2009-2014 yang mengesahkan total 125 RUU. Sementara dalam Prolegnas 2015-2019 terdapat 189 RUU Prolegnas dan 37 RUU Prolegnas Kumulatif.

Tapi, di tengah sorotan dan kritikan itu, DPR periode lalu telah mencoba bekerja keras melakukan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, legislasi, dan anggaran. Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2019, 16 Agustus 2019, menyampaikan apresiasi atas kinerja DPR yang telah bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah. Di bidang anggaran, misalnya, DPR telah menyetujui alokasi Dana Desa sebesar Rp 70 triliun pada 2019 yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Masyarakat menaruh harapan besar

PENULIS ADALAH ANGGOTA DPR RI DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN